

## Perubahan Iklim sebagai *Threat Multiplier* dalam Ancaman Keamanan di Nigeria: Peran Kemiskinan dalam Rekrutmen Kelompok Bersenjata

**Najla Khaira Syabila Tonni**

Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Hasanuddin,  
Makassar, Indonesia

\*Email Korespondensi: [najal.khaira07@gmail.com](mailto:najal.khaira07@gmail.com)

Diterima: 20-06-2026 | Disetujui: 25-06-2026 | Diterbitkan: 27-06-2026

### ABSTRACT

*Climate change has evolved into a multifaceted threat to climate security, no longer merely an environmental threat or simply an environmental issue. This study examines how climate change affects Nigeria's internal security vulnerabilities. These internal security vulnerabilities are exacerbated by climate change. The study examines the causal relationship between conflict dynamics and ecological degradation using qualitative methodology and literature analysis. The findings reveal how the agricultural sector (the foundation of Nigerian society and economy) has been devastated by natural disasters such as the shrinking of Lake Chad and prolonged droughts. The resulting loss of livelihoods has led to forced migration, mass unemployment, and structural poverty. The loss of livelihoods has led to forced migration, mass unemployment, and structural poverty. Armed groups, particularly Boko Haram, have exploited this extreme economic hardship by offering monetary incentives as a recruitment tool. Rather than directly causing violence, climate change exacerbates instability by making existing poverty and socioeconomic vulnerabilities far more severe.*

**Keywords:** Climate Change, Threat Multiplier, Poverty, Armed Group Recruitment, Nigeria.

### ABSTRAK

Perubahan iklim telah berkembang menjadi ancaman multifaset terhadap keamanan iklim, bukan lagi sekadar ancaman lingkungan atau hanya masalah lingkungan. Studi ini meneliti bagaimana perubahan iklim memengaruhi kerentanan keamanan internal Nigeria. Kerentanan keamanan internal ini diperparah oleh perubahan iklim. Studi ini meneliti hubungan sebab-akibat antara dinamika konflik dan degradasi ekologis menggunakan metodologi kualitatif dan analisis literatur. Temuan menunjukkan bagaimana sektor pertanian (fondasi masyarakat dan ekonomi Nigeria) telah hancur akibat bencana alam seperti penyusutan Danau Chad dan kekeringan berkepanjangan. Hilangnya mata pencaharian yang diakibatkannya telah menyebabkan migrasi paksa, pengangguran massal, dan kemiskinan struktural. Kelompok bersenjata, khususnya Boko Haram, telah mengeksploitasi kesulitan ekonomi ekstrem ini dengan menawarkan insentif uang sebagai alat perekrutan. Alih-alih secara langsung menyebabkan kekerasan, perubahan iklim memperburuk ketidakstabilan dengan membuat kemiskinan dan kerentanan sosial ekonomi yang ada menjadi jauh lebih parah.

**Katakunci:** Perubahan Iklim, Pengganda Ancaman, Kemiskinan, Perekrutan Kelompok Bersenjata, Nigeria

Bagaimana Cara Sitasi Artikel ini:

Tonni, N. K. S. (2026). Perubahan Iklim sebagai Threat Multiplier dalam Ancaman Keamanan di Nigeria: Peran Kemiskinan dalam Rekrutmen Kelompok Bersenjata. Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora, 2(2), 2254-2265. <https://doi.org/10.63822/rarf3z02>

## PENDAHULUAN

Perdebatan mengenai batasan studi Keamanan Internasional telah mengalami pergeseran paradigma yang signifikan dalam beberapa dekade terakhir. Arus utama studi Hubungan Internasional (HI), yang dulunya didominasi oleh perspektif realis konvensional, cenderung mengadopsi konsep keamanan yang sempit melalui kacamata militeristik tradisional. Dalam pandangan klasik ini, keamanan selalu berpusat pada kedaulatan teritorial negara (keamanan yang berpusat pada negara) terhadap ancaman agresi militer eksternal. Namun, kompleksitas global kontemporer telah memaksa para pemikir HI untuk melakukan rekonseptualisasi yang lebih inklusif. Agenda keamanan kini mengalami perluasan dan pendalaman yang membawa wacana ini ke ranah keamanan manusia, sebuah konsep yang menempatkan individu dan komunitas sebagai objek utama yang harus dilindungi dari berbagai ancaman non-tradisional (Sitorus et al., 2025).

Dalam realita pada politik global saat ini, cara kita menangani isu-isu lingkungan dan perubahan iklim telah berubah. Topik-topik ini dulunya sering diabaikan dan umumnya hanya dibahas di kalangan ilmiah. Kini, isu-isu tersebut menjadi gangguan besar yang mengancam stabilitas sosial dan politik masyarakat lokal (Akinyetun et al., 2025). Ketidaknormalan iklim di seluruh dunia kini dipandang sebagai faktor yang menyebabkan ketidakstabilan di negara-negara dengan tata kelola yang lemah. Akibatnya, perubahan iklim diakui sebagai masalah global yang kompleks yang mempengaruhi perekonomian suatu negara, hubungan sosial, dan bahkan sistem pertahanan dan keamanan internalnya (Bonner, 2025). Krisis ini mengubah cara pandang kita terhadap konflik. Faktor lingkungan kini terkait dengan keputusan politik dan tindakan kelompok bersenjata non-negara.

Pada wilayah Afrika Barat, khususnya sabuk Sahel, merupakan salah satu kawasan di dunia yang mengalami dampak perubahan iklim secara nyata dan semakin meningkat (Bonner, 2025). Di daerah ini, penurunan kualitas lahan yang signifikan, kekeringan ekstrem yang berkepanjangan, dan krisis pangan yang berkepanjangan bukanlah hal yang akan terjadi di masa depan, melainkan sudah menjadi kenyataan sehari-hari yang terus-menerus mengurangi ketahanan nasional di negara-negara berkembang. Penurunan daya dukung lingkungan yang drastis ini menyebabkan kelangkaan sumber daya yang menjadi inti kehidupan masyarakat di pedesaan (Sitorus et al., 2025). Sebagai negara dengan jumlah penduduk terbesar dan kekuatan ekonomi utama di kawasan ini, Nigeria berada di posisi sebagai salah satu episentrum yang paling rentan dan paling terganggu oleh perubahan ekologis ini (Unaam, 2025).

Salah satu tanda paling nyata dari kemerosotan ekologi dan menjadi sumber kekhawatiran internasional adalah penyusutan yang signifikan pada cekungan Danau Chad yang berada di wilayah utara Nigeria (Akogwu et al., 2024). Danau yang beberapa dekade lalu masih dipenuhi air dalam jumlah besar ini, kini hanya mencakup kurang dari sepuluh persen dari luas aslinya. Pada kenyataannya, Danau Chad sangat penting bagi jutaan petani, penggembala, dan nelayan di seluruh wilayah perbatasan (Bressler, 2020). Penurunan luas yang signifikan ini secara langsung menyebabkan degradasi ekosistem pertanian, runtuhnya sektor perikanan darat, dan menipisnya persediaan air bersih, yang menimbulkan keputusasaan di kalangan penduduk setempat (Unaam, 2025).

Sebagian besar penduduk di Nigeria Utara sepenuhnya bergantung pada sektor pertanian tradisional, yang di mana hal tersebut sangat bergantung pada stabilitas siklus alam (Akogwu et al., 2024). Ketika ketidaknormalan iklim mengganggu pola musim dan menurunkan produktivitas tanah, perekonomian rumah tangga di komunitas pedesaan pun runtuh secara bersamaan (Awoke & Brück, 2026). Runtuhnya ekonomi berbasis lahan ini tidak hanya menyebabkan kemiskinan ekstrem dan kelaparan, tetapi

juga menciptakan lonjakan pengangguran di kalangan penduduk usia kerja dan memicu migrasi internal berskala besar (Akinyetun et al., 2025). Menurut UNDP (2023), kondisi kemiskinan ekonomi yang parah ini pada akhirnya menciptakan celah kerentanan keamanan kritis yang menimbulkan ancaman serius terhadap stabilitas nasional Nigeria.

Ketika lembaga-lembaga negara secara struktural gagal menyediakan jaring pengaman sosial atau menawarkan solusi adaptif yang konkret, legitimasi pemerintah di mata publik akan hancur. Ketidakpuasan struktural dan frustrasi publik terhadap negara menciptakan kekosongan kekuasaan yang kemudian dimanfaatkan oleh aktor non-negara, seperti kelompok teroris bersenjata Boko Haram, untuk memperluas pengaruh mereka (Bressler, 2020). Ketimpangan pembangunan dan marginalisasi wilayah utara, yang diperburuk oleh krisis iklim, memudahkan kelompok-kelompok radikal dalam mempengaruhi individu untuk bergabung dengan kelompok mereka (Wang et al., 2024). Kelompok-kelompok bersenjata ini memasuki komunitas lokal bukan lagi hanya untuk mempromosikan ideologi agama yang kaku, tetapi untuk mengeksploitasi kerentanan finansial dan kebutuhan dasar untuk bertahan hidup dari penduduk (Akogwu et al., 2024).

Mengingat kompleksitas fenomena ini, penelitian ini bertujuan untuk melakukan analisis mendalam mengenai peran perubahan iklim sebagai faktor yang memperparah ancaman di Nigeria. Fokus utama analisis ini adalah bagaimana kemiskinan struktural yang diakibatkan oleh degradasi lingkungan berfungsi sebagai variabel perantara yang mempercepat efektivitas mekanisme perekrutan bagi kelompok-kelompok teroris bersenjata (Unaam, 2025). Melalui artikel ini, penulis berupaya mengurai jaringan kompleks yang menghubungkan krisis ekologi global dengan dinamika konflik domestik dari perspektif Ekonomi Politik Keamanan Internasional. Meskipun hubungan antara perubahan iklim dan konflik telah banyak diteliti, mekanisme spesifik yang menghubungkan degradasi lingkungan dengan rekrutmen kelompok bersenjata melalui mediasi kemiskinan di konteks Nigeria masih memerlukan kajian yang lebih mendalam dan sistematis. Artikel ini bertujuan mengisi celah tersebut dengan menelusuri rantai sebab-akibat dari perubahan iklim menuju rekrutmen kelompok bersenjata, menempatkan kemiskinan sebagai variabel mediasi krusial dalam rantai kausalitas tersebut.

## METODE PENELITIAN

Untuk menganalisis fenomena ini secara objektif dan mendalam, penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif serta dengan menggunakan metode tinjauan pustaka yang komprehensif. Sejalan dengan pandangan Basrowi (2013), pendekatan kualitatif adalah prosedur penelitian yang berfokus pada pemahaman mendalam terhadap fenomena sosial dengan menempatkan peneliti atau instrumen analisis untuk menangkap makna dari realitas yang diamati. Rancangan penelitian ini berfokus pada pemahaman terhadap proses emosional, sosial, dan struktural di dalam masyarakat. Secara khusus, penelitian ini mengkaji bagaimana pola perilaku sosiologis dan keputusan rasional individu berubah ketika dihadapkan pada kebuntuan ekonomi yang diakibatkan oleh krisis ekologi ekstrem. Pendekatan deskriptif-kualitatif dipilih karena penulis tidak hanya ingin menyajikan angka-angka statistik tentang konflik, melainkan juga mengungkap makna, motif tersembunyi, dan hubungan sebab-akibat non-linear antara degradasi lingkungan dan keputusan penduduk untuk terlibat dalam ekstremisme bersenjata.

Seluruh data yang digunakan dalam penelitian ini memanfaatkan data sekunder yang dikumpulkan melalui penelitian dokumenter. Sumber data sekunder ini dipilih secara selektif, termasuk artikel dari jurnal

internasional terkemuka, buku teks tentang studi konflik kontemporer, laporan kemajuan ilmiah, dan laporan berkala dari organisasi internasional, seperti *United Nations Development Programme* (UNDP), serta data statistik resmi mengenai dampak sosiologis dari konflik. Pengumpulan data dilakukan melalui pencarian literatur digital di basis data akademik internasional. Proses pencarian data difokuskan secara ketat pada kata kunci tertentu, yaitu: perubahan iklim, *threat multiplier*, kemiskinan, dan perekrutan kelompok bersenjata di Nigeria. Kriteria literatur dibatasi pada publikasi ilmiah terkini dari sepuluh tahun terakhir untuk memastikan relevansinya dengan dinamika keamanan kontemporer di Afrika Barat (Basrowi, 2013).

Analisis ini dilakukan secara tematis dengan mengidentifikasi pola hubungan di antara variabel-variabel utama perubahan iklim, degradasi lingkungan, keruntuhan ekonomi, kemiskinan, dan perekrutan bersenjata lalu memetakan pola-pola tersebut dalam kerangka kausal yang koheren. Framework *threat multiplier* digunakan sebagai lensa analitis untuk menjelaskan bagaimana perubahan iklim memperparah kerentanan yang sudah ada tanpa menjadi satu-satunya penyebab konflik. Salah satu keterbatasan utama studi ini adalah kurangnya data lapangan primer, sehingga kesimpulan yang dihasilkan bersifat kontekstual dan harus didukung oleh penelitian empiris lebih lanjut.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. Kerangka Teoritis: Threat Multiplier dan Keamanan Iklim

Konsep *threat multiplier* pertama kali dipopulerkan dalam konteks kebijakan pertahanan AS untuk menggambarkan bagaimana perubahan iklim tidak menciptakan ancaman baru dengan sendirinya, melainkan memperkuat, mempercepat, dan memperparah ancaman yang sudah ada (Goodman, 2024). Dalam konteks Afrika Sub-Sahara dan khususnya Sahel, konsep ini menjelaskan bagaimana tekanan lingkungan berinteraksi dengan kerentanan sosial-ekonomi, kelemahan lembaga negara, dan ketegangan historis sehingga menciptakan kondisi yang kondusif bagi konflik bersenjata (Akinyetun et al., 2025; Bonner, 2025).

Secara konseptual, faktor-faktor yang memperparah ancaman beroperasi melalui beberapa jalur: (1) persaingan atas sumber daya, di mana kelangkaan memicu konflik antara kelompok-kelompok yang sebelumnya hidup berdampingan; (2) runtuhnya mata pencaharian, yang memicu migrasi paksa dan keputusan ekonomi; (3) guncangan ketahanan pangan yang memicu ketegangan sosial; dan (4) mobilitas paksa yang menempatkan populasi rentan dalam jangkauan kelompok bersenjata (Awoke & Brück, 2026; Unaam, 2025). Semua jalur ini dipengaruhi oleh konteks lokal, terutama kualitas tata kelola, tingkat kemiskinan, dan tingkat marginalisasi masyarakat (Akinyetun et al., 2025).

Penting untuk dicatat bahwa konsep ini memiliki keterbatasan epistemologis. Pertama, konsep ini berisiko menyederhanakan hubungan kausal yang kompleks secara berlebihan dengan terlalu menekankan iklim sebagai satu-satunya variabel pendorong. Kedua, sebagaimana dikritik oleh Akinyetun et al. (2025), perspektif *fragility-conflict* menawarkan penjelasan yang lebih komprehensif dengan mengidentifikasi kemiskinan, pengangguran kaum muda, indeks pembangunan manusia yang rendah, dan tata kelola pemerintahan yang buruk sebagai faktor penentu konflik yang lebih dominan daripada iklim saja. Dalam artikel ini, *threat multiplier* dipahami secara dinamis bahwa perubahan iklim tidak berfungsi sebagai penyebab langsung, melainkan sebagai pemicu yang memperparah kerentanan struktural yang sudah ada sebelumnya, dengan kemiskinan sebagai variabel perantara yang paling kritis.

## 2. Tekanan Ekologis dan Realitas Perubahan Iklim di Wilayah Nigeria

Nigeria telah mengalami perubahan iklim yang signifikan dan dapat diukur selama beberapa dekade terakhir. Data dari Badan Meteorologi Nigeria (2021, dikutip dalam Bonner, 2025) menunjukkan kenaikan suhu rata-rata sebesar  $1,3^{\circ}\text{C}$  untuk periode 1901–2020, disertai dengan penurunan curah hujan tahunan sebesar 95 mm. Di wilayah Timur Laut, yang berbatasan dengan Cekungan Danau Chad, perubahan ini terwujud dalam bentuk kekeringan yang lebih lama dan lebih sering, variabilitas curah hujan yang tinggi, serta percepatan proses penggurunan.

Fenomena paling simbolis dari krisis iklim di kawasan ini adalah menyusutnya Danau Chad. Danau yang pada tahun 1960-an mencakup luas 25.000 km<sup>2</sup> ini kini telah menyusut lebih dari 90%, yang berdampak langsung pada kehidupan sekitar 40 juta orang di empat negara: Nigeria, Niger, Chad, dan Kamerun (Bonner, 2025; Unaam, 2025). Penyusutan ini tidak semata-mata disebabkan oleh perubahan iklim global, tetapi juga oleh eksploitasi berlebihan dan pola penggunaan lahan yang tidak berkelanjutan, sehingga menjadikannya masalah dengan berbagai penyebab yang memerlukan respons lintas sektor.

Di negara bagian Borno dan Yobe, lebih dari 70% penduduk mengandalkan pertanian tadah hujan dan penggembalaan sebagai mata pencaharian mereka (UNDP, 2023). Penurunan vegetasi, yang diukur melalui indeks NDVI, ditemukan memiliki korelasi positif secara statistik dengan peningkatan insiden terorisme ( $r = 0,61$ ,  $p < 0,05$ ) berdasarkan analisis regresi panel yang dilakukan oleh Unaam (2025) untuk periode 2000–2023. Hal ini menegaskan adanya jalur kausal dari degradasi ekologi menuju ketidakstabilan keamanan, meskipun dengan mediasi penting dari variabel tata kelola.

Perkiraan cuaca tidak menunjukkan adanya perbaikan. Menurut UNHCR Climate Risk Profile for the Sahel (2021) memperkirakan bahwa suhu di wilayah Sahel akan naik antara  $2,0^{\circ}\text{C}$  dan  $4,3^{\circ}\text{C}$  pada tahun 2080 dibandingkan dengan tingkat pra-industri. Ketersediaan air per kapita diproyeksikan akan menurun sebesar 40% di beberapa negara Sahel, sementara proporsi penduduk yang terkena gelombang panas setidaknya sekali dalam setahun akan meningkat dari 4,3% (2000) menjadi 19,9% (2080). Tekanan ekologis yang semakin meningkat ini akan terus memperparah kerentanan masyarakat agraris yang sudah rentan (UNHCR, 2021).

## 3. Akar Penyebab Masalah: Ketergantungan Agraria dan Kemiskinan Struktural

Untuk memahami bagaimana perubahan iklim memicu munculnya kelompok-kelompok bersenjata, penting untuk menelusuri rantai sebab-akibat secara sistematis. Proses ini tidak bersifat linier maupun seketika, melainkan merupakan akumulasi bertahap dari tekanan-tekanan yang saling memperkuat.

Fase pertama (1960-an–1990-an) ditandai dengan degradasi lingkungan yang progresif: penyusutan Danau Chad dimulai pada pertengahan 1960-an, diikuti oleh kekeringan parah pada 1970-an dan 1980-an yang menghancurkan sistem pertanian tradisional. Ketersediaan lahan pertanian yang produktif menurun drastis, memaksa komunitas nelayan, petani, dan penggembala untuk bersaing memperebutkan sumber daya yang semakin langka. Sitorus et al. (2025) mencatat bahwa perubahan iklim selama fase ini mengikis struktur sosial dan melemahkan lembaga-lembaga tradisional yang telah lama berfungsi sebagai mekanisme penyelesaian konflik.

Fase kedua (tahun 2000-an–2010-an) ditandai dengan semakin mengakarnya kemiskinan struktural dan munculnya krisis pemerintahan. Runtuhnya mata pencaharian berbasis alam memicu gelombang migrasi pedesaan-perkotaan yang tidak terkelola dengan baik, sehingga menciptakan konsentrasi kaum muda pengangguran di pusat-pusat perkotaan di seluruh wilayah timur laut Nigeria. Wang et al. (2024)

mendokumentasikan bagaimana ketimpangan spasial dalam distribusi sumber daya dan layanan publik menciptakan kantong-kantong marginalisasi yang menjadi lahan subur bagi mobilisasi ekstremis. Pada periode yang sama, Boko Haram mulai mengkonsolidasikan basis sosialnya dengan mengeksploitasi kemarahan atas kemiskinan dan ketidakadilan.

Fase ketiga (2010-an–sekarang) ditandai oleh hubungan yang saling memperkuat antara konflik bersenjata dan krisis iklim-ekonomi. Ikpe (2017) memperkirakan bahwa kerugian ekonomi akibat pemberontakan Boko Haram di timur laut Nigeria mencapai miliaran dolar, termasuk kerusakan infrastruktur, terganggunya perdagangan, pengungsian massal, dan anjloknya investasi. Hal ini menciptakan lingkaran setan di mana konflik memperparah kemiskinan, kemiskinan memperluas basis rekrutmen, rekrutmen memperkuat kelompok bersenjata, yang kemudian semakin menghancurkan perekonomian.

#### **4. Dampak Ekonomi dan Sosial: dari Kelangkaan Sumber Daya ke Disintegrasi Komunitas**

Dampak ekonomi perubahan iklim di Nigeria Timur Laut bersifat kumulatif dan multidimensi. Penurunan produktivitas pertanian akibat kekeringan dan degradasi lahan secara langsung mengurangi pendapatan rumah tangga petani yang sudah hidup dalam kondisi rentan. Bonner (2025) mencatat bahwa di Nigeria Timur Laut, 76% penduduk hidup dalam kemiskinan, sementara tingkat pengangguran kaum muda di daerah pedesaan mencapai 65%. Di Chad—negara tetangga dengan dinamika ekologi yang serupa—tingkat pengangguran pemuda mencapai 22% dan terus meningkat.

Konflik antara penggembala dan petani, yang diperparah oleh kelangkaan sumber daya air dan lahan peternakan, merupakan salah satu dampak sosial yang paling menonjol. Akinyetun et al. (2025) mencatat bahwa, menurut African Union Peace and Security Commissioner (2018), konflik antara penggembala dan petani di Afrika telah merenggut lebih banyak nyawa daripada terorisme. Di Nigeria, lebih dari 10.000 orang tewas akibat konflik tersebut, antara tahun 2009 dan 2019. Kelangkaan air tidak hanya memicu konflik horizontal antar komunitas, tetapi juga mendorong migrasi massal, sehingga menimbulkan ketegangan di daerah tujuan.

Ikpe (2017) mendokumentasikan secara komprehensif dampak konflik di Nigeria timur laut terjadi penutupan ribuan sekolah dan fasilitas kesehatan, kerusakan infrastruktur perdagangan, runtuhnya sektor pertanian dan perikanan, serta pengungsian jutaan orang yang kehilangan aset produktif mereka. Sejak tahun 2015, lebih dari 2,9 juta orang tetap mengungsi di dalam negeri di wilayah ini (UNHCR, 2023). Biaya ekonomi dari pengungsian ini tidak hanya terdiri dari hilangnya produktivitas, tetapi juga erosi modal sosial dan jaringan dukungan masyarakat yang telah lama berfungsi sebagai jaring pengaman bagi kelompok-kelompok rentan.

Awoke dan Brück (2026), dalam tinjauan sistematis terhadap 52 studi tingkat rumah tangga dari tahun 2020 hingga 2025, menegaskan bahwa paparan konflik secara konsisten mengurangi ketahanan pangan rumah tangga, meningkatkan kemiskinan, dan memperburuk kondisi kesehatan, terutama bagi perempuan dan anak-anak. Sitorus et al. (2025) menambahkan dimensi gender, perempuan mengalami peningkatan kekerasan berbasis gender dalam konteks krisis iklim-konflik, termasuk pernikahan paksa sebagai strategi bertahan hidup secara ekonomi dan perekrutan paksa oleh kelompok bersenjata.

## 5. Kemiskinan sebagai Variabel Mediasi: Kerentanan Individu dan Keterbatasan Pilihan

Kemiskinan berperan sebagai variabel perantara yang krusial yang menghubungkan degradasi lingkungan dengan perekrutan ke dalam kelompok bersenjata. Namun, kemiskinan di sini tidak dipahami semata-mata sebagai keterbatasan ekonomi, melainkan sebagai kondisi multidimensi yang mencakup keterbatasan akses terhadap pendidikan, layanan kesehatan, peluang kerja formal, dan perwakilan politik.

Dalam laporannya *Journey to Extremism in Africa*, UNDP (2023) menemukan bahwa 71% individu yang bergabung dengan kelompok bersenjata menyebutkan motivasi ekonomi sebagai faktor utama, jauh melampaui motivasi ideologis atau agama. Sebuah survei UNDP (2023, dikutip dalam Unaam, 2025) di komunitas-komunitas yang terkena dampak perubahan iklim di Borno dan Yobe mengungkapkan bahwa 62% kaum muda mengaitkan partisipasi mereka dalam kelompok bersenjata dengan “kurangnya pilihan mata pencaharian.” Hal ini menunjukkan bahwa, di mata individu-individu yang terkena dampak, bergabung dengan kelompok bersenjata bukanlah pilihan ideologis, melainkan perhitungan rasional berdasarkan kendala yang ada.

Kerentanan individu terhadap perekrutan diperparah oleh faktor-faktor struktural yang saling terkait: (1) hilangnya aset produktif akibat perubahan iklim, yang melemahkan ketahanan rumah tangga; (2) tidak adanya jaring pengaman sosial yang disediakan negara untuk melindungi warga negara saat menghadapi guncangan; (3) pengangguran massal di kalangan pemuda, yang menciptakan kelebihan tenaga kerja yang tidak terserap; dan (4) marginalisasi politik terhadap komunitas tertentu, yang memicu rasa frustrasi dan keterasingan terhadap negara (Akinyetun et al., 2025; Bressler, 2020).

Bressler (2020) secara khusus menganalisis hubungan antara kekeringan dan kekuatan Boko Haram di timur laut Nigeria. Ia berargumen bahwa periode kekeringan parah secara konsisten berkorelasi dengan peningkatan kapasitas perekrutan kelompok tersebut, karena petani dan nelayan yang kehilangan sumber penghasilan menjadi terbuka terhadap tawaran ekonomi dari kelompok bersenjata. Akogwu et al. (2024) memperkuat argumen ini dengan menunjukkan bahwa perubahan iklim berperan dalam perekrutan Boko Haram bukan melalui saluran ideologis, melainkan melalui terciptanya kondisi keputusan ekonomi yang membuat tawaran kelompok bersenjata tersebut tampak sebagai satu-satunya pilihan yang layak.

## 6. Mekanisme Rekrutmen Kelompok Bersenjata: Eksploitasi Sistematis atas Kerentanan Iklim

Kelompok bersenjata seperti Boko Haram dan ISWAP telah mengembangkan strategi perekrutan yang secara sistematis memanfaatkan kerentanan yang ditimbulkan atau diperparah oleh perubahan iklim. Bonner (2025) mengidentifikasi empat mekanisme operasional utama yang digunakan kelompok-kelompok ini sebagai respons terhadap krisis iklim.

Mekanisme pertama adalah pengambilalihan sumber daya air dan lahan subur yang tersisa. ISWAP dan Boko Haram secara strategis mengambil alih sumber air yang tersisa dan lahan pertanian produktif, kemudian memungut “pajak” atas akses masyarakat terhadap sumber daya tersebut. Ini bukan sekadar sumber pendapatan, melainkan instrumen kekuasaan yang menciptakan ketergantungan masyarakat lokal pada kelompok bersenjata (Bonner, 2025; International Crisis Group, 2020).

Mekanisme kedua melibatkan penyediaan layanan alternatif untuk menggantikan peran negara. ISWAP diketahui memberikan uang tunai, makanan, dan layanan dasar kepada masyarakat di Negara Bagian Borno yang menghadapi kerawanan pangan parah (International Crisis Group, 2023). Di Zamfara, kelompok bandit menawarkan perlindungan dan bagian dari barang jarahan kepada pemuda yang tidak

memiliki alternatif ekonomi. Strategi ini memanfaatkan kegagalan negara dalam menyediakan respons adaptasi iklim yang memadai untuk membangun loyalitas komunitas.

Mekanisme ketiga adalah perekrutan dari kamp pengungsi. Wilayah di sekitar Danau Chad, yang telah menjadi tujuan bagi orang-orang yang terpaksa mengungsi, telah berubah menjadi lahan perekrutan di mana Boko Haram menawarkan peluang ekonomi kepada pemuda yang terpaksa melarikan diri dan tidak memiliki alternatif. Strategi perekrutan ini menekankan identitas agama dan kebutuhan ekonomi, dengan menargetkan pemuda Muslim yang terpinggirkan di wilayah yang mayoritas penduduknya beragama Kristen (Bonner, 2025). Sejak 2015, lebih dari 71.000 orang telah mengungsi dari Nigeria dan Kamerun utara ke tepi Danau Chad, sementara 2,9 juta lainnya masih mengungsi di dalam negeri.

Mekanisme keempat adalah perjanjian “perlindungan” dengan komunitas penggembala. Sejumlah komunitas penggembala telah menandatangani perjanjian perlindungan dengan Boko Haram, membayar dengan ternak sebagai imbalan atas akses tak terbatas ke lahan penggembalaan dan perlindungan dari kelompok bersenjata lainnya. Hal ini menciptakan ekonomi politik di mana tekanan iklim mendorong komunitas untuk mendukung kelompok ekstremis demi kelangsungan hidup (Tony Blair Institute, 2024). Kondisi-kondisi ini secara tidak langsung memperkuat kapasitas finansial dan teritorial kelompok bersenjata.

## 7. Perubahan Iklim sebagai Threat Multiplier: Interaksi Antar Variabel

Dengan menggabungkan semua analisis di atas, kita dapat mengidentifikasi bagaimana perubahan iklim berperan sebagai *threat multiplier* dalam rantai sebab-akibat yang saling berhubungan. Unaam (2025) memetakan rantai ini sebagai berikut; faktor-faktor pemicu tekanan iklim (meningkatnya suhu, menurunnya curah hujan) → kelangkaan sumber daya yang akut → runtuhnya mata pencaharian dan putus asa secara ekonomi → dua krisis paralel (kekosongan tata kelola akibat kegagalan adaptasi negara serta lonjakan pengangguran kaum muda dan ketidakpuasan sosial) → eksploitasi oleh kelompok-kelompok teroris → berlanjutnya terorisme.

Yang sangat penting dalam model ini adalah peran tata kelola sebagai variabel mediasi yang menentukan apakah faktor-faktor pemicu iklim akan berubah menjadi konflik atau tidak (Akinyetun et al., 2025). Di wilayah dengan tata kelola yang baik, masyarakat memiliki mekanisme adaptasi kelembagaan yang mencegah tekanan ekologis berubah menjadi konflik. Sebaliknya, di wilayah dengan tata kelola yang lemah, seperti Timur Laut Nigeria, kegagalan negara dalam menyediakan adaptasi iklim, akses yang adil terhadap sumber daya, dan jaring pengaman sosial justru menciptakan kondisi di mana kelompok bersenjata dapat mengisi kekosongan tersebut.

Wang et al. (2024) menggunakan analisis spasial-temporal untuk menunjukkan bahwa perkembangan konflik bersenjata di Nigeria selama periode 2000–2020 tidak tersebar secara acak, melainkan terkonsentrasi di wilayah-wilayah yang ditandai oleh kombinasi tekanan iklim yang tinggi, kemiskinan akut, dan lemahnya kehadiran negara. Pola ini menegaskan bahwa interaksi antara perubahan iklim, kemiskinan, dan tata kelola yang buruk, telah memberikan penjelasan tentang geografi konflik di Nigeria.

Awoke dan Brück (2026), dalam tinjauan sistematis mereka, menekankan bahwa hubungan antara iklim, konflik, dan ketahanan pangan bersifat dua arah; konflik memperburuk kerentanan iklim dengan menghancurkan infrastruktur adaptasi dan memaksa petani meninggalkan lahan mereka, sementara kerentanan iklim dan kerawanan pangan memperkuat motivasi untuk bergabung atau mendukung

kelompok bersenjata. Hal ini menciptakan lingkaran umpan balik positif yang membuat siklus tersebut sulit diputus tanpa intervensi simultan di semua titik dalam rantai sebab-akibat.

### 8. Respons Pemerintah Nigeria dan Intervensi Internasional

Pemerintah Nigeria telah menerapkan berbagai kebijakan untuk menangani pemberontakan di wilayah Timur Laut, namun pendekatan yang dominan tetap bersifat militeristik. Operasi Lafiya Dole dan operasi militer selanjutnya berhasil merebut kembali wilayah yang dikuasai Boko Haram, namun gagal mengatasi akar masalah struktural yang mendorong perekrutan anggota. Unaam (2025) berpendapat bahwa intervensi kontra-terorisme yang murni bersifat militer akan terus gagal selama masih mengabaikan akar masalah ekologi dan ekonomi dari konflik tersebut.

Di tingkat regional, program Great Green Wall, sebuah inisiatif transnasional untuk merehabilitasi lahan yang terdegradasi di koridor Sahel, dan Strategi Stabilisasi Cekungan Danau Chad merupakan langkah-langkah yang secara konseptual tepat. Namun, Unaam (2025) mencatat bahwa program-program ini secara kronis kekurangan dana dan terfragmentasi secara operasional. Lake Chad Basin Commission (LCBC), yang bertugas mengkoordinasikan respons lintas batas, menghadapi kendala kapasitas kelembagaan yang signifikan dalam mengintegrasikan kebijakan iklim dengan keamanan.

Intervensi internasional hadir dalam berbagai bentuk. UN Security Council Resolution 2349 (2017) menyediakan kerangka hukum untuk mengakui dimensi iklim di Danau Chad. UN Climate Security Mechanism Established in 2018, yang didirikan pada tahun 2018, berupaya mengintegrasikan pertimbangan iklim ke dalam perencanaan pemeliharaan perdamaian (Bonner, 2025). Melalui laporannya *Journey to Extremism* (2023), UNDP menganjurkan pendekatan yang menempatkan pemberdayaan ekonomi sebagai inti dari strategi deradikalisasi. Namun, semua inisiatif ini menghadapi tantangan implementasi yang signifikan dalam konteks tata kelola yang lemah dan konflik yang sedang berlangsung.

Akogwu et al. (2024) menekankan bahwa efektivitas respons terhadap perekrutan Boko Haram sangat bergantung pada kemampuan negara dan komunitas internasional untuk menyediakan alternatif ekonomi yang nyata bagi pemuda rentan sebelum kelompok bersenjata mengisi kekosongan tersebut. Program-program deradikalisasi yang ada sering kali berfokus pada aspek ideologis dan mengabaikan akar masalah ekonomi, menurut bukti dari UNDP (2023), yang justru merupakan motivator utama.

### 9. Kondisi Keamanan dan Prospek ke Depan

Kondisi keamanan di Timur Laut Nigeria, meski mengalami fluktuasi, belum mencapai stabilitas yang berkelanjutan. Regresi panel Unaam (2025) mengidentifikasi korelasi yang kuat ( $r = 0,61$ ) antara anomali suhu dan insiden terorisme di Borno, Yobe, dan Katsina, dengan periode kekeringan akut (2009–2012 dan 2018–2022) yang secara konsisten bertepatan dengan lonjakan signifikan dalam serangan oleh kelompok bersenjata. Pola ini menegaskan bahwa selama tekanan iklim terus meningkat tanpa diimbangi dengan adaptasi yang memadai, ancaman rekrutmen dan aksi oleh kelompok bersenjata akan terus berlanjut.

Wang et al. (2024) mendokumentasikan bahwa persepsi sosial terhadap kelompok bersenjata di Nigeria telah mengalami transformasi yang kompleks, di beberapa komunitas, Boko Haram dan ISWAP tidak sepenuhnya dipandang sebagai ancaman eksternal, tetapi secara paradoks sebagai penyedia keamanan dan keadilan alternatif di wilayah-wilayah yang di mana kehadiran negara nyaris tidak ada. Fenomena ini, yang juga dianalisis oleh Unaam (2025) sebagai '*institutional capture*', menyoroti kedalaman krisis

legitimasi negara yang harus ditangani. Tanpa intervensi terintegrasi yang secara bersamaan menangani tekanan iklim, kemiskinan struktural, dan defisit tata kelola, Nigeria akan tetap terjebak dalam siklus di mana degradasi ekologi memperdalam kemiskinan, yang pada gilirannya memperluas basis rekrutmen kelompok bersenjata, sehingga semakin menghambat pembangunan dan adaptasi iklim.

## KESIMPULAN

Artikel ini telah menunjukkan bahwa perubahan iklim berperan sebagai faktor pengganda ancaman yang signifikan dalam konteks keamanan Nigeria dengan memperkuat (bukan menciptakan) kondisi yang memudahkan perekrutan kelompok bersenjata. Rantai sebab-akibat yang dapat diidentifikasi berawal dari degradasi ekologi (menyusutnya Danau Chad, kekeringan, desertifikasi) menuju runtuhnya mata pencaharian agraris, kemiskinan struktural yang memperparah keterbatasan pilihan individu, dan pada akhirnya eksploitasi sistematis oleh kelompok-kelompok seperti Boko Haram dan ISWAP memanfaatkan kondisi-kondisi keputusan ini.

Kemiskinan terbukti menjadi variabel perantara paling kritis dalam rantai ini. Data empiris dari UNDP (2023) dan berbagai studi yang dianalisis secara konsisten menunjukkan bahwa motivasi ekonomi mendominasi keputusan untuk bergabung dengan kelompok bersenjata, jauh melampaui motivasi ideologis. Hal ini memiliki implikasi kebijakan yang mendasar, strategi kontra-terorisme yang tidak menangani akar ekonomi dari perekrutan akan terus gagal, bahkan jika berhasil secara militer dalam jangka pendek.

Pemerintahan yang buruk berperan sebagai pemicu utama dari kegagalan negara dalam menyediakan adaptasi iklim, akses yang adil terhadap sumber daya, dan layanan dasar menciptakan kekosongan legitimasi yang kemudian diisi oleh kelompok bersenjata melalui tata kelola alternatif. Hal ini menguatkan argumen Akinyetun et al. (2025) bahwa *fragility state* (bukan sekadar iklim) merupakan prediktor terkuat terjadinya konflik, dengan iklim yang berfungsi sebagai pemicu yang mengungkap dan memperparah kerapuhan struktural tersebut.

Berdasarkan temuan ini, artikel ini merekomendasikan strategi keamanan terintegrasi yang mencakup: (1) mengintegrasikan analisis risiko iklim ke dalam kebijakan keamanan nasional; (2) investasi besar-besaran dalam program mata pencaharian atau pekerjaan yang berbasis iklim pintar bagi pemuda di wilayah rentan; (3) memperkuat tata kelola sumber daya alam lintas batas di bawah LCBC dan ECOWAS; dan (4) mengintegrasikan lembaga tradisional ke dalam perencanaan adaptasi iklim dan keamanan tingkat komunitas. Tanpa pendekatan terintegrasi semacam itu, Nigeria akan terus menghadapi siklus tak berujung dari krisis iklim, kemiskinan, dan ketidakstabilan keamanan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Akinyetun, T. S., Fatai-Abatan, A., & Ogunbodede, N. (2025). Heated environment, armed people: Between “climate change conflict” and “fragility conflict” in the Sahel. *Journal of Asian and African Studies*, 60(8), 5327-5350. <https://doi.org/10.1177/00219096241285108>
- Akogwu, J. C., Onuoha, F. C., Ezech, K. D., & Attah, D. U. (2024). Climate change and terrorism: Exploring Boko Haram's recruitment in Nigeria. *IKENGA: International Journal of Institute of African Studies*, 25(2). [https://www.ikengajournal.com.ng/admin/img/paper/25\\_2-2.pdf](https://www.ikengajournal.com.ng/admin/img/paper/25_2-2.pdf)

- Bonner, I. (2025). Climate-related Security Risks in the Sahel. *Journal of Central and Eastern European African Studies*, 5(2), 72-83. <https://doi.org/10.12700/jceeas.2025.5.2.317>
- Bressler, T. (2020). Drought and Extremism-How Climate Change Impacts the Power of Boko Haram in Northeastern Nigeria. <https://lup.lub.lu.se/luur/download?func=downloadFile&recordId=9011380&fileId=9011390>
- Goodman, S. (2024). *Threat multiplier: Climate, military leadership, and the fight for global security*. Island Press.
- Ikpe, E. (2017). Counting the development costs of the conflict in North-Eastern Nigeria: the economic impact of the Boko Haram-led insurgency. *Conflict, Security & Development*, 17(5), 381-409. <https://doi.org/10.1080/14678802.2017.1371987>
- Sitorus, L. A., Santoso, M. P. T., & Marsingga, P. (2025). Dampak Perubahan Iklim Terhadap Konflik Sosial Dan Kekerasan Gender: Studi Kasus Keamanan Manusia Di Sub Sahara Afrika. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 11(10. B), 167-188. <https://jurnal.peneliti.net/index.php/JIWP/article/view/11697>
- Unaam, A. O. (2025). Fueling the Insurgency: Climate-Resource Scarcity and the Persistence of Terrorism in Northern Nigeria. *International Journal of Contemporary Security Studies*, 1(2), 137-144. <https://www.ceeol.com/search/article-detail?id=1392823>
- United Nations Development Programme. (2023). Journey to extremism in Africa: Pathways to recruitment and disengagement. UNDP. <https://www.undp.org/africa/publications/journey-extremism-africa-pathways-recruitment-and-disengagement>
- UNDP. (2023). *Human Security and Climate Resilience in the Sahel*. United Nations Development Programme.
- United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR). (2021). *Climate Risk Profile Sahel region*. Retrieved June 10, 2025 from <https://www.unhcr.org/61a49df44.pdf>
- United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR). (2023). *Global trends: Forced displacement in 2022*. UNHCR Statistical Yearbook.
- International Crisis Group. (2020). *The central Sahel: A perfect sandstorm*. Crisis Group Africa Report Nr.227.
- International Crisis Group. (2023). *Violence in the Sahel: Africa's new epicentre of terrorism*. Report No. 317.
- Tony Blair Institute. (2024). From Crisis to Conflict: Climate Change and Violent Extremism in the Sahel. Retrieved June 10, 2025 from <https://institute.global/insights/geopolitics-and-security/from-crisis-to-conflict>
- Wang, F., Gao, J., & Liu, Y. (2024). Spatiotemporal evolution of Nigeria's armed conflicts and terrorism and the associated shift in social perceptions. *Humanities and Social Sciences Communications*, 11(1), 1-13. <https://www.nature.com/articles/s41599-024-03778-9>